



PERSOALAN HUKUM NELAYAN DAN KELOMPOK NELAYAN DI KABUPATEN TAKALAR

¹Abd. Asis[✉], ²Slamet Sampurno S, ³Amir Ilyas, ⁴Dara Indrawati, ⁵Audyna Mayasari Muin, ⁶Kadarudin

^{1,2,3,4,5}Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

⁶Mahasiswa Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin

asisfhuh@yahoo.co.id¹, slametsampurno@gmail.com², amirilyas@gmail.com³, daraindrawati@yahoo.com⁴, audynamayasari@gmail.com⁵, kadarudin.fnu@gmail.com⁶

Naskah diterima: 27 Agustus 2018; revisi: 19 September 2018; disetujui: 21 Oktober 2018



Abstract

Geographically, Takalar Regency is mostly surrounded by the ocean and also borders the Makassar Strait, although geographically it is not the same as other regencies such as those in South Sulawesi (for example Selayar Islands Regency) but according to BPS Takalar Regency that sectors that have contributed Takalar's economy is very large, it is still in the agricultural sector, which is 49.94 percent, with the fisheries sub-sector contributing around 36.73 percent, thus the Regional Government of Takalar Regency should pay more attention to the lives of fishermen so that the fishermen do not change professions to jobs that on land.

Keywords: *fishermen; legal issues, Takalar Regency.*

✉ Alamat korespondensi:

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Tlp +62411-586200

E-mail: asisfhuh@yahoo.co.id

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai visi "Takalar Terdepan Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat sejahtera, Berkeadilan, Beriman dan Bertaqwa" sehingga memiliki kewajiban untuk mengambil suatu kebijakan yang lebih konkrit dengan memberikan perhatian ekstra terhadap pembangunan (Buku Putih Kabupaten Takalar Tahun 2013). Secara geografis Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattalassang terletak antara 503' sampai dengan 5038' Lintang Selatan dan 119022' sampai 119039' Bujur Timur. Di Sebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh selat Makassar dan Laut Flores. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km persegi yang terdiri dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan. Kecamatan Polombangkeng Utara adalah kecamatan terluas dengan 212,25 km persegi atau luas kecamatan tersebut sebesar 37,47 persen dari total luas wilayah Kabupaten Takalar (BPS: Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2016). Dalam visi tersebut terlihat bahwa Takalar terdepan dalam pelayanan menuju masyarakat sejahtera, berkeadilan, beriman dan bertaqwa, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sehingga kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Takalar tidak terkecuali oleh para nelayan. Dalam posisi ini kita dapat mengartikan bahwa pelayanan maksimal kepada masyarakat sehingga kesejahteraan dapat terwujud, maksudnya masyarakat miskin dapat ditekan angkanya dan masyarakat tidak akan sulit dalam memperbaiki ekonominya, utamanya bagi masyarakat pesisir yang notabene mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan (nelayan). Sedangkan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sehingga keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Takalar dapat diartikan bahwa pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya (warga Kabupaten Takalar) dapat merata dari ujung barat ke ujung timur dan dari ujung utara hingga ujung selatan, sehingga tidak ada ketimpangan pelayanan dan masyarakat se-Kabupaten Takalar dapat merasakan keadilan tanpa dibeda-bedakan, utamanya bagi masyarakat pesisir yang notabene mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan yang hingga saat ini jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Salah satu andalan sektor pertanian di daerah ini adalah sub sektor perikanan karena tiap tahunnya nilai produksi dari sub sektor tersebut selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sektor yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perekonomian Takalar adalah masih tetap sektor pertanian yaitu 49,94 persen. Besarnya kontribusi tersebut ditopang oleh sub sektor perikanan dengan kontribusi sekitar 36,73 persen (BPS: Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2016). Sektor perikanan menjadi hal yang menjanjikan utamanya bagi masyarakat pesisir yang notabene mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan (nelayan), karena tidak lain secara geografis Kabupaten Takalar memang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh lautan dan juga berbatasan dengan Selat Makassar, walaupun dalam hal geografis tidak sama dengan

wilayah kabupaten lainnya seperti yang ada di Sulawesi Selatan (sebagai contoh Kabupaten Kepulauan Selayar) namun menurut BPS Kabupaten Takalar bahwa sektor yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perekonomian Takalar adalah masih tetap sektor pertanian yaitu 49,94 persen, dengan sub sektor perikanan yang berkontribusi sekitar 36,73 persen, dengan demikian maka seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar harus lebih memperhatikan kehidupan nelayannya sehingga para nelayan tidak beralih profesi ke pekerjaan yang ada di darat.

Salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang menjadikan sektor perikanan sebagai sektor andalan bagi pertumbuhan ekonominya adalah Kabupaten Takalar khususnya Desa Tamasaju, dimana penduduknya mempunyai dua pekerjaan baik sebagai nelayan yang sekaligus juga menjadi seorang petani yang dikerjakan baik secara paruh waktu maupun penuh waktu dari aktifitas utamanya sebagai nelayan. Mencermati fenomena tersebut, maka salah satu masalah fungsional yang penting dan harus diatasi oleh masyarakat nelayan adalah masalah "adaptasi". Masalah adaptasi ialah bagaimana seharusnya atau searifnya alam fisik dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk partisipasi di satu pihak sebagai aktivitas eksteren dan dilain pihak interaksi dinamika interen dikalangan kelompok-kelompok nelayan itu sendiri dalam melestarikan aktifitas-aktifitas secara tradisional yang tetap dipertahankan dan erat kaitannya dengan konteks budaya lokal yang mendukung pemanfaatan sumberdaya hayati perairan secara berkelanjutan (Andi Adrie Arief, Partisipasi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar, Studi Kasus Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Jurnal Hutan dan Masyarakat Vol. III No. 1 Edisi Mei 2008). Gambaran tersebut memberikan cerminan kepada kita bahwa masyarakat Kabupaten Takalar cukup kreatif dalam mengelola perekonomian keluarganya, karena sejumlah potensi yang ada kemudian di maksimalkan dengan sebaik-baiknya, ini terlihat dari penduduknya yang mempunyai dua pekerjaan baik sebagai nelayan yang sekaligus juga menjadi seorang petani yang dikerjakan baik secara paruh waktu maupun penuh waktu dari aktifitas utamanya sebagai nelayan.

Zonasi Wilayah Perikanan Tangkap di Kabupaten Takalar terdiri dari dua wilayah yakni wilayah Pantai Utara dimana terdapat satu kecamatan yakni Kecamatan Galesong Utara dan terdiri dari tiga desa diantaranya Desa Aeng Batu-Batu, Desa Tamalate, dan Desa Tamasaju. Dan wilayah Pantai Selatan, dimana terdapat tiga kecamatan yakni Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, dan Kecamatan Mangarabombang dan terdiri dari enam desa, yakni Desa Boddia, Desa Bontomarannu, Desa Kaluku Bodo, desa Mangindara, dan Desa Tope Jawa. Kabupaten Takalar memiliki potensi sumberdaya perairan yang cukup besar dan dapat dikelola dengan cara pengembangan potensi sektor perikanan yakni potensi perikanan budidaya dan potensi perikanan tangkap (St. Nurul Nahdyah, dkk, Keragaman Jenis Kapal Perikanan di Kabupaten Takalar, Jurnal IPTEKS PSP, Vol. 1 No. 1 Edisi April 2014). pengembangan potensi sektor perikanan yakni potensi perikanan budidaya dan potensi perikanan tangkap menjadi sektor yang cukup dominan bagi para nelayan di Kabupaten Takalar, selain didasarkan pada angka-angka BPS, cerminan nelayan dan kelompok nelayan di Kabupaten Takalar juga menunjukkan hasil yang positif bagi ketersediaan ikan di kabupatennya.

Pemerintah Kabupaten Takalar yang mempunyai visi Takalar terdepan dalam pelayanan menuju masyarakat sejahtera, berkedilan, beriman dan bertaqwa tidaklah mudah untuk dicapai, ini perlu dukungan partisipasi masyarakat dan semua pihak (*stakeholders*) untuk mewujudkan visi tersebut. Namun secara substansi visi tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk berbenah demi Kabupaten Takalar yang lebih baik. Masyarakat di Kabupaten Takalar juga memiliki andil dalam mewujudkan visi tersebut dengan cara ikut berpartisipasi mensukseskan setiap program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar utamanya pada program-program pemberdayaan masyarakat sehingga program-program dapat tepat sasaran utamanya bagi para nelayan dan kelompok nelayan (masyarakat pesisir secara umum) karena sub sektor perikanan yang berkontribusi sekitar 36,73 persen bagi perekonomian Kabupaten Takalar.

Potensi-potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Takalar dapat saja terganggu akibat maraknya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, pada akhir Tahun 2015, Polisi Perairan mengamankan sebuah kapal KM Sunggumanai yang dinakhodai Ancu Dg Muntu Bin Kompa Dg Satti (45 Tahun) warga Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan barang bukti alat tangkap ikan jenis Cantrang dan ikan campuran seberat 20 kg (Republik Pos Online, Edisi 18 September 2015). Berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah permasalahan hukum dan sosial nelayan di Kabupaten Takalar? dan Bagaimanakah kendala-kendala penangkapan ikan oleh nelayan di Kabupaten Takalar?

II. PEMBAHASAN

A. Permasalahan Hukum dan Sosial Nelayan di Kabupaten Takalar

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki daerah pesisir sangat luas dan diperkirakan 240 juta jiwa (60% jumlah penduduk) hidup di wilayah pesisir (sampai dengan 50 km dari pantai), dengan 22% penduduknya hidup dan tinggal di daerah pesisir sebagaimasyarakat desa pesisir. Ada sekitar 4.735 desa dari 64.439 desa yang ada di berbagai propinsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa pesisir. Dengan sumberdaya alamnya yang melimpah, ikan, terumbu karang dan lain sebagainya, belum dieksplorasi secara optimal. Salah satu propinsi yang memiliki banyak wilayah laut adalah propinsi Sulawesi Selatan yang memang dari dulu terkenal masyarakatnya sebagai pelaut ulung. Di antara daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi laut adalah Kabupaten Takalar yang terletak di arah selatan ibukota propinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, tepatnya berada sekitar 45 km dari kota Makassar. Selain itu Kabupaten Takalar juga merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis dikenal sebagai daerah kawasan pantai. Hal itu tercermin di dalamnya terdapat sejumlah penduduk berprofesi sebagai nelayan dan bermatapencarian utama sebagai penangkap ikan dan biota laut yaitu tepatnya di wilayah pesisir Galesong. Mayoritas penduduk yang bermukim di wilayah pesisir Galesong bermata pencarian nelayan. Pada umum-

nya jenis-jenis usaha tersebut dilakukan secara tradisional menurut sitem pengetahuan dan peralatan yang cukup sederhana. Pengetahuan dan teknologi tersebut diwarisi dari generasi terdahulu, yang kemudian ditransformasikan kepada generasi yang lebih muda melalui proses sosialisasi. Sistem pengetahuan dan teknologi tradisional dalam bidang penangkapan itu masih banyak sampai sekarang (Muhammad Irfan, 2018:1). Kabupaten Takalar selain merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis dikenal sebagai daerah kawasan pantai, juga memang karena sub sektor perikanan yang berkontribusi sekitar 36,73 persen bagi perekonomian Kabupaten Takalar menjadi indikator mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar harus lebih memperhatikan para nelayan dan kelompok nelayan (masyarakat pesisir secara umum), hal tersebut agar dapat mencegah peralihan profesi nelayan di Kabupaten Takalar untuk mencari pekerjaan di darat, sehingga sub-sektor yang menjadi andalan Kabupaten Takalar (sub-sektor perikanan) masih terus dapat dipertahankan.

Berada dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia, menjadikan laut Indonesia kaya akan ragam biota laut seperti ikan dan terumbu karang. Tak heran, Indonesia adalah salah satu produsen ikan terbesar di dunia, termasuk untuk jenis ikan karang. Sebagai komoditas strategis, aktivitas penangkapan ikan karang menjadi salah satu yang paling banyak digeluti oleh nelayan kita. Termasuk oleh Kelompok Nelayan Lanna Perdana di Dusun Lanna, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ada yang unik dari kelompok beranggotakan 31 nelayan Suku Makassar ini. Tidak seperti nelayan Takalar lainnya yang menggunakan berbagai alat tangkap, Kelompok Nelayan Lanna Perdana fokus menggunakan rawai dasar untuk menangkap ikan karang dari ikan sunu hingga kerapu. Selama tiga tahun terakhir, didampingi WWF-Indonesia dan Yayasan Mattirosi, lembaga percepatan pembangunan perikanan, Kelompok Lanna Perdana mulai melakukan perbaikan praktik penangkapan ikan karang. Tujuannya, agar sumber daya ikan karang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Melalui skema JARNUS (Jaringan Kerja Perikanan Bertanggung Jawab Nusantara) program perbaikan perikanan di Dusun Lanna meliputi penilaian awal praktik penangkapan ikan, dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi perbaikan praktik penangkapan ikan melalui skema FIP (*Fisheries Improvement Program*) yang mengacu pada standar MSC (*Marine Stewardship Council*). Berpedoman pada rencana aksi yang telah disusun, Kelompok Nelayan Lanna Perdana dilatih cara menangkap dan menangani ikan karang yang ramah lingkungan, sesuai dengan panduan BMP (*Better Management Practices*) yang telah disusun oleh WWF-Indonesia (Munawir, 2017). Program-program ini perlu mendapat apresiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, karena dengan demikian program tersebut dapat maksimal sehingga dampak yang ditimbulkan juga cukup signifikan dalam perbaikan perekonomian masyarakat di Kabupaten Takalar. Skema JARNUS (Jaringan Kerja Perikanan Bertanggung Jawab Nusantara) ini menjadi titik balik bagi nelayan dan kelompok nelayan yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir Kabupaten Takalar untuk mendapatkan pengetahuan lebih sehingga dapat menopang pekerjaannya agar lebih maksimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan bagi lingkungan hidup khususnya lingkungan

laut yang selama ini tidak menjadi pertimbangan bagi para nelayan dalam menangkap ikan. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh WWF-Indonesia dan Yayasan Mattirosi, lembaga percepatan pembangunan perikanan harus mendapat dukungan penuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Salah satu kegiatan masyarakat nelayan dalam melakukan aktivitasnya dalam mencari hasil kekayaan laut adalah sebagai "Patorani" asal kata dari "torani", yaitu kegiatan nelayan untuk mencari telur ikan terbang. Nelayan Dalam proses pencarian hasil laut tersebut diperlukan waktu yang hingga berbulan sampai tiga bulanan dan dilakukan dan melibatkan banyak orang. Nelayan patorani menempati dua wilayah Galesong yaitu Galesong Selatan dan Galesong Utara. Jumlah desa di dua kecamatan tersebut sebanyak 12 buah desa. Namun diantara desa-desa tersebut, terdapat lokasi yang dijadikan sebagai basis terbanyak ditempati oleh nelayan patorani yakni desa Galesong baru, Paklakkang dan Bontosunggu. Tempat ini, sejak dari dulu hingga sekarang menjadi tempat menyimpan (parkir) perahu komunitas nelayan patorani ketika kembali melakukan penangkapan. Dalam kegiatan nelayan patorani melibatkan banyak orang yang dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu, papalele, pinggawa, dan sawi. Papalele adalah pemilik perahu dan sekaligus pemilik modal, pinggawa adalah pemimpin awak perahu, sementara sawi adalah buruh. Tiga kategori nelayan ini memainkan peran utama dalam terlaksananya kegiatan patorani. Papalele tidak pernah melaut dan ikut melakukan penangkapan, sedangkan pinggawa dan sawi adalah kelompok yang melakukan penangkapan. Ketiga unsur nelayan tersebut antara *papalele*, *punggawa* dan *sawi* terjalin ikatan kontrak kerjasama, baik sebelum pemberangkatan, sedang dan setelah pulang dari pengkapan. Terjadinya jalinan ikatan pada *papalele*, *pinggawa* dan *sawi* sangat terkait dengan pembagian hasil tangkapan. Pembagian hasil tersebut antara *papalele*, *pinggawa* dan *sawi* dilakukan setelah mengeluarkan seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan selama kegiatan torani. Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan nelayan patorani adalah sistem bagi hasil tiga bagian setelah dipotong biaya operasional oleh pemilik modal. Ketentuan bagi hasil atau pendapatan ini merupakan kesepakatan secara tidak tertulis yang secara umum telah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang hingga sekarang. Walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya kesepakatan lain yang dilakukan secara ke dalam yang sifatnya personal oleh masing-masing pihak. Pembagian hasil tangkapan patorani, apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada pemilik modal (*papalele*) pemimpin perahu (*pinggawa*) serta buruh perahu (Muhammad Irfan, 2018:1-3). Desa Galesong baru, Paklakkang dan Bontosunggu yang selama ini dijadikan basis nelayan harus mendapatkan program-program pemberdayaan dan pendampingan sehingga program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dapat tepat sasaran dan tidak menjadi program penghabisan anggaran belaka tanpa mendapatkan hasil yang memuaskan.

Masyarakat pesisir, nelayan dan kelompok nelayan memiliki masalah hukum dan sosial di masyarakat. Masalah hukum meliputi jenis alat tangkap sehingga merusak lingkungan hidup utamanya lingkungan laut. Sedangkan permasalahan sosial adalah

mengenai kehidupan nelayan yang tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar seperti akses terhadap Pendidikan bagi anak-anak nelayan, akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak bagi ibu hamil, menyusui dan masyarakat pesisir yang rentan sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, belum lagi masalah cemooan masyarakat dan anak-anak nelayan menjadi bahan olok-olokan bagi teman sebayanya yang mungkin saja secara ekonomi dan penghasilan orang tuanya lebih baik, ditambah lagi harga ikan yang tidak sesuai harapan nelayan padahal jika dipertimbangkan resikonya untuk menangkap ikan sangatlah besar, sehingga memungkinkan nelayan untuk tidak melaut lagi, belum adanya asuransi nelayan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang juga menjadi permasalahan tersendiri bagi nelayan untuk mempertimbangkan kelanjutan pekerjaannya sebagai penangkap ikan. Hal-hal tersebut perlu segera dipikirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, sehingga visi Takalar terdepan dalam pelayanan menuju masyarakat sejahtera, berkedilan, beriman dan bertaqwa dapat terwujud, termasuk juga dapat dirasakan oleh para nelayan, kelompok nelayan, dan masyarakat pesisir secara umum.

B. Kendala Penangkapan Ikan Oleh Nelayan di Kabupaten Takalar

Kota Makassar dan Kabupaten Takalar berada pada wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 713 dengan kondisi ekosistem terumbu karang yang rentan akan penangkapan yang merusak dan diperparah oleh gejala penangkapan secara berlebih (*overfishing*). sehingga menjadi hambatan dalam kebijakan pengelolaan perikanan pada aktivitas konservasi sumberdaya ikan. Menurut informasi terbaru keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia No.47/KEPMEN-KP/2016 untuk tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan diwilayah WPP RI 713 telah berstatus *Over-exploited* sebanyak 83.2 persen yaitu ikan demersal, udang, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi dan 13. 7 persen *Fully-exploited* ikan pelagis kecil dan ikan pelagi besar (non-tuna dan cakalang) hanya ikan karang yang berstatus moderate 3.2 persen. Informasi ini merupakan landasan rezim pengelolaan perlu diterapkan secara tepat dan adil sehingga menjadikan dasar Yayasan Mattirotasi, Jaring Nusantara dan WWF Indonesia melakukan kajian IUU *Fishing* di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar dimulai mengumpulkan data awal sehingga kendala perbaikan perikanan tangkap dari parameter IUU *Fishing* dapat dimaksimalkan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai kepatuhan dan aktifitas pelanggaran serta hambatan dalam pene-gakan aturan yang berlangsung dilapangan. kajian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017 sampai 14 September 2017 dengan tahapan melakukan pengumpulan data lapangan di nelayan, unit pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, instansi pemerintah daerah kota/kabupaten serta Provinsi Sulawesi Selatan. Penilaian IUU *Fishing* pada indeks *illegal fishing* (penangkapan melanggar hukum), *unreported fishing* (penangkapan tidak diatur) dan *unregulated fishing* (penangkapan tidak dilaporkan) dengan 29 parameter strategis menggunakan analisis logaritma dengan hasil penilaian 1 – 3 dengan kategori tindakan pemberantasan IUU *Fishing* Buruk bernilai 1 Sedang bernilai 2 dan baik bernilai 3 (Sudarman, 2017). Parameter strategis dengan menggunakan analisis logaritma ini menjadi cerminan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk

mengevaluasi sejumlah program-program strategis yang selama ini dilaksanakan utamanya bagi program-program yang objeknya adalah para nelayan, kelompok nelayan, dan masyarakat pesisir secara umum.

Perubahan musim di Perairan Selat Makassar yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir pantai Barat Kabupaten Takalar mengakibatkan perubahan jumlah tangkapan sehingga berdampak pada pendapatan usaha tangkapnya (A. Rahim, dkk, 2018: 50). Perubahan musim ini juga sebenarnya sudah diketahui oleh para nelayan dan kelompok nelayan, sehingga untuk mengatasi hal tersebut para nelayan dan kelompok nelayan mempunyai dua pekerjaan baik sebagai nelayan yang sekaligus juga menjadi seorang petani yang dikerjakan baik secara paruh waktu maupun penuh waktu dari aktifitas utamanya sebagai nelayan. Jadi sebenarnya walaupun perubahan musim mengakibatkan perubahan jumlah tangkapan sehingga berdampak pada pendapatan usaha tangkapnya namun hal tersebut sudah dapat di taktisi oleh para nelayan dan kelompok nelayan.

Pengelolaan perikanan tangkap memiliki potensi konflik sosial, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal di kalangan masyarakat nelayan. Salah satu penyebab konflik nelayan adalah pelanggaran batas wilayah penangkapan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan yang tidak mengenal batas wilayah kewenangan pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan, nelayan Sulawesi Selatan tetapi lebih cenderung mengikuti pergerakan potensi sumberdaya ikan. Kebiasaan mengejar pergerakan ikan hingga daerah lain tersebut dikenal dengan istilah nelayan andon. Nelayan andon terjadi karena dua hal diantaranya musim penangkapan yang tidak mendukung dan ketersediaan stok ikan. Kegiatan andon sudah berlangsung sejak lama, khususnya nelayan Bugis dan Makassar. Beberapa nelayan Bugis-Makassar yang melakukan andon hidup menetap di beberapa wilayah pesisir Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Sumatera. Menurut Wiyono (2013), kegiatan andon dilakukan sebagai bentuk strategi adaptasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi di daerahnya. Penetapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyebabkan sebagian daerah menafsirkan secara sempit otonomi daerah (OTDA), sehingga menimbulkan konflik sosial di wilayah pesisir dan laut. Persoalan yang muncul harus diatur untuk menghindari konflik lebih besar seperti pembakaran kapal, alat tangkap ikan dan pengusiran nelayan andon oleh nelayan lokal. Diperlukan adanya suatu konsep kebijakan pengelolaan yang didalamnya ada instrumen yang mengatur keberadaan nelayan andon pada suatu daerah yang saling menguntungkan. Keberadaan nelayan andon memberikan kontribusi yang cukup besar, baik nelayan lokal maupun untuk pembangunan di kabupaten/kota yang menjadi tujuan nelayan andon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi dan karakteristik nelayan andon asal kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Karakteristik dan distribusi keberadaan nelayan andon pada suatu kabupaten/kota yang menjadi tujuan antara lain bahwa nelayan andon di Sulawesi Selatan terdiri dari dua jenis yakni nelayan andon tidak menetap dan nelayan andon tidak tetap. Pertimbangan nelayan melakukan andon karena ketersediaan ikan di daerah asalnya stoknya berkurang dan faktor musim penangkapan ikan. Nelayan andon memberikan peluang

untuk terbukanya lapangan kerja bagi nelayan lokal, meningkatkan retribusi daerah, meningkatkan produksi perikanan daerah tersebut. Nelayan andon membelanjakan uangnya lebih besar sehingga menggairahkan ekonomi masyarakat lokal (Ihsan dan Muhammad Sulaiman, 2012:46, 52-53). Hal ini telah sejalan dengan rencana aksi yang telah disusun, para nelayan dan kelompok nelayan di Kabupaten Takalar dilatih cara menangkap dan menangani ikan karang yang ramah lingkungan, sesuai dengan panduan BMP (*Better Management Practices*) yang telah disusun oleh WWF-Indonesia, sehingga dengan demikian, pertimbangan nelayan melakukan andon karena ketersediaan ikan di perairan Kabupaten Takalar stoknya berkurang dan faktor musim penangkapan ikan. Nelayan andon memberikan peluang untuk terbukanya lapangan kerja bagi nelayan lokal, meningkatkan retribusi daerah, dan juga meningkatkan produksi perikanan daerah yang menyumbang cukup tinggi bagi perekonomian di Kabupaten Takalar.

Kegiatan pertambangan pasir laut mengancam ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, selanjutnya hal tersebut akan berdampak pada produktivitas perikanan serta pendapatan nelayan. Setidaknya pada lokasi tersebut terdapat pemijahan ikan milik masyarakat, habitat kepiting, cumi, ikan. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri memiliki aset pada wilayah tersebut berupa Balai Benih Air payau Takalar yang memproduksi benih udang unggulan. Penurunan ekosistem lingkungan juga bisa dilihat dari pendapatan nelayan saat melaut, sebelum tambang pasir laut beroperasi umumnya dalam dua hari melaut nelayan mendapatkan ikan dua basket, saat ini bisa seminggu bahkan lebih hanya mendapatkan dua *basket*, sebagai perbandingan ekonomi harga ikan katombo per-*basket* mencapai 250-300 ribu rupiah. Sedangkan bensin dibutuhkan minimal sampai 20 liter (200 ribu rupiah). Penurunan produktivitas perikanan laut tersebut diakibatkan diantaranya karena naiknya kekeruhan air pada air laut, maupun karena ada perubahan aliran air laut. Dari sisi keanekaragaman hayati, bahkan perairan Galesong, khususnya sekitar pulau Sanrobengi masih memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bagus. Bahkan masuk sebagai kawasan konservasi perairan dalam pola ruang KSN mamminasata. Berdasar Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 17 Ayat 1 sebelum diterbitkannya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) maka izin lokasi untuk pertambangan pasir laut belum dapat diproses. Namun pada faktanya 4 perusahaan sudah memiliki izin dan beroperasi pada kawasan tersebut (Walhi, 2017). Hal ini yang menjadi kendala tersendiri terkait penangkapan ikan oleh nelayan dan kelompok nelayan di Kabupaten Takalar. Penurunan produktivitas perikanan laut tersebut diakibatkan diantaranya karena naiknya kekeruhan air pada air laut, maupun karena ada perubahan aliran air laut yang disumbang oleh penambangan pasir di wilayah tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar demi keberlanjutan dan ketersediaan ikan di wilayah perairannya.

Saat ini Ranperda RZWP3K sedang dalam proses penyusunan sayangnya Ranperda yang sedang disusun ini memiliki beberapa permasalahan pokok (Walhi, 2017):

1. Ranperda RZWP3K Sulawesi Selatan memberikan ruang yang luas untuk eksploitasi, dari luas wilayah lautan ± 94.399,85 Km², seluas 47.959,32 peruntukannya ditetapkan sebagai pertambangan pasir laut.
2. Penyusunan Ranperda RZWP3K tidak dilakukan secara partisipatif, dalam penyusunannya tidak benar-benar melibatkan masyarakat ataupun unsur organisasi masyarakat lainnya, khususnya kelompok terdampak dan yang memiliki concern pada lingkungan hidup.
3. Tidak ada kajian lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya secara menyeluruh. Berdasar PP 46 Tahun 2016 pasal 3, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan dalam penyusunan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sebanyak 953 buah bantuan mesin perahu merek honda dengan kapasitas 7, 9, dan 12 PK, segera didistribusikan untuk nelayan kecil yang ada di Kab. Takalar oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) yang bersumber dari bantuan kementerian ESDM RI. Hal tersebut terungkap saat dilaksanakan kegiatan Sosialisasi teknis pendistribusian dan pemasangan paket konversi paket BBM ke BBG untuk paket kapal perikanan dan nelayan kecil tahun 2018, yang berlangsung hari ini di ruang pola kantor Bupati Takalar Sabtu, 15 September 2018. Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Takalar Sirajuddin Saraba, menjelaskan terkait pendistribusian bantuan tersebut "Ada 953 buah bantuan mesin dari Kementerian ESDM RI, yang dalam waktu dekat ini akan kami distribusikan kepada masyarakat nelayan yang memenuhi syarat, seperti harus punya perahu, harus memiliki kartu nelayan, dan berprofesi sebagai nelayan. Pemberian bantuan ini sangat bersinergi dengan program P22 Bupati Takalar, yakni program yang ke 4, berkaitan dengan bantuan sarana dan prasarana nelayan. Rencana penyerahan secara simbolis pada tanggal 21 september yang akan diserahkan oleh Bupati Takalar, Dirjen Migas, Kementerian ESDM dan anggota komisi 7 DPR RI". Dilain pihak, seorang calon penerima bantuan, Dg Nai yang merupakan nelayan dari Dusun Labbo tallua, Desa Mattirobaji Kepulauan Tanakeke, mengatakan, "Saya sangat senang dapat bantuan mesin dari pemerintah, karena kami mau beli, cuma kami tak punya uang, jadi bantuan ini sangat kami syukuri". Hal senada juga di sampaikan Alwi, seorang nelayan dari Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan mengatakan "Bagus karena selama ini saya pakai mesin kecil, saya berharap bisa dapat mesin yang lebih besar seperti yang 12 PK, saya sangat berterimakasih pada pemerintah Takalar, karena memperhatikan nelayan". Bantuan mesin perahu nelayan khusus untuk nelayan kecil ini, sudah termodifikasi, karena tidak menggunakan bahan bakar premium lagi, tapi menggunakan bahan bakar gas, jadi setiap nelayan penerima bantuan, selain menerima mesin perahu, juga mendapat bantuan dua buah tabung gas 3 kilogram (Ihwan, 2018). Bantuan ini merupakan salah satu *breakdown* dari visi Takalar terdepan dalam pelayanan menuju masyarakat sejahtera, berkedilan, beriman dan bertaqwa dapat terwujud khususnya pada nilai keadilan bagi masyarakat pesisir, nelayan dan kelompok nelayan. Dengan demikian, bantuan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para nelayan yang selama ini berkontribusi baik bagi perekonomian daerah maupun pereko-

nomian nasional, apalagi negara Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara maritime dan bahkan *tagline* Pemerintahan Joko Widodo adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia, oleh karena itu para nelayan harus mendapatkan perhatian lebih sehingga keberlanjutan baik ikan, penangkapan ikan, dan kelestarian lingkungan hidup khususnya lingkungan laut dapat terus terjaga dari berbagai macam potensi kerusakan dan pengrusakan.

III. PENUTUP

Sektor perikanan menjadi hal yang menjanjikan utamanya bagi masyarakat pesisir yang notabene mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan (nelayan), karena tidak lain secara geografis Kabupaten Takalar memang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh lautan dan juga berbatasan dengan Selat Makassar, walaupun dalam hal geografis tidak sama dengan wilayah kabupaten lainnya seperti yang ada di Sulawesi Selatan (sebagai contoh Kabupaten Kepulauan Selayar) namun menurut BPS Kabupaten Takalar bahwa sektor yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perekonomian Takalar adalah masih tetap sektor pertanian yaitu 49,94 persen, dengan sub sektor perikanan yang berkontribusi sekitar 36,73 persen, dengan demikian maka seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar harus lebih memperhatikan kehidupan nelayannya sehingga para nelayan tidak beralih profesi ke pekerjaan yang ada di darat. Kegiatan pertambangan pasir laut mengancam ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, selanjutnya hal tersebut akan berdampak pada produktivitas perikanan serta pendapatan nelayan. Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dengan cara bukan saja hanya memberikan bantuan alat tangkap ikan bagi para nelayan, namun juga menutup akses penambangan pasir di wilayah perairan Kabupaten Takalar sehingga keberlanjutan baik ikan, penangkapan ikan, dan kelestarian lingkungan hidup khususnya lingkungan laut dapat terus terjaga dari berbagai macam potensi kerusakan dan pengrusakan yang disebabkan baik oleh kelalaian maupun kesengajaan hanya karena keuntungan semata tanpa memperhatikan faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahim, dkk, **Pengaruh Lama Melaut, Kekuatan Mesin Tempel, dan Karakteristik Responden Terhadap Pendapatan Nelayan Tangkap Tradisional di Kabupaten Takalar**, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian "Agrisociconomics" Volume 2 Nomor 1, Mei 2018.
- Andi Adrie Arief, **Partisipasi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar, Studi Kasus Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara**, Jurnal Hutan dan Masyarakat Vol. III No. 1 Edisi Mei 2008.
- Badan Pusat Statistik, **Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2016**.
Buku Putih Kabupaten Takalar Tahun 2013.

- Ihsan dan Muhammad Sulaiman, **Distribusi dan Karakteristik Nelayan Andon Asal Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan**, Marine Fisheries Volume 3 Nomor 1, Mei 2012.
- Ihwan, **Dinas Perikanan Takalar Segera Distribusikan Bantuan 953 Mesin Perahu Untuk Nelayan Kecil Takalar**, Sulsel Berita 2018, lihat <https://sulselberita.com/2018/09/15/dinas-perikanan-takalar-segera-distribusikan-bantuan-953-mesin-perahu-untuk-nelayan-kecil-takalar/>
- Muhammad Irfan, **Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar**, Jurnal Al-Qadau, Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.
- Munawir, **Menilai Kepatuhan Nelayan Kabupaten Takalar dalam Perbaikan Perikanan Karang**, WWF Indonesia, 2017, lihat <https://www.wwf.or.id/?54362/Evaluating-the-Fishermens-Level-of-Compliance-in-Takalar-Regency-in-Coral-Fishery-Improvement>
- Republik Pos Online, Edisi 18 September 2015.
- Sudarman, **Diseminasi IUU Fishing Membuka Permasalahan Pengelolaan Perikanan Makassar dan Takalar**, Kumparan 2017, lihat <https://kumparan.com/sudarman-fishery/diseminasi-iuu-fishing-membuka-permasalahan-pengelolaan-perikanan-makassar-dan-takalar-1506083878460>
- St. Nurul Nahdyah, dkk, **Keragaman Jenis Kapal Perikanan di Kabupaten Takalar**, Jurnal IPTEKS PSP, Vol. 1 No. 1 Edisi April 2014.
- Walhi, **Ancaman Kerusakan Lingkungan Hidup Tambang Pasir Laut; Kasus Kab. Takalar, Sulawesi Selatan**, 2017, lihat <https://walhi.or.id/ancaman-kerusakan-lingkungan-hidup-tambang-pasir-laut-kasus-kab-takalar-sulawesi-selatan/>
- Wiyono ES., **Kendala dan Strategi Operasi Penangkapan Ikan Alat Tangkap Bubu Di Muara Angke**, Jakarta. Jurnal Ilmu Perikanan Tropis. Vol. 18 No. 2, Tahun 2013.